
Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Buton

Ismail ^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: ismail@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 15 November 2024

Accepted: 1 Desember 2024

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton berdasarkan dimensi: Organisasi, intepretasi dan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Peneliti bereran sebagai instrument utama dalam mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan ferivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan bantuan sosial tunai dilakukan dengan 3 aspek yaitu (1) organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia melibatkan Dinas Sosial, TNI Polri, kejaksaan dan Kantor Pos. (2) Intepretasi kebijakan menunjukkan adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. (3) penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan penerima bantuan masih menggunakan data sebelumnya.

Kata kunci: kebijakan, implementasi & bantuan sosial sosial

Abstract

The purpose of the study is to describe the Implementation of the Cash Social Assistance (BST) Distribution Policy During the Pandemic in Buton Regency based on the dimensions: Organization, interpretation and implementation. The method used is qualitative descriptive. Researchers are the main instruments in collecting, presenting and analyzing data. Data were collected through interviews, observations and documentation. Technical data analysis is carried out by means of data reduction, data presentation and data ferrivation. The results of the study show that the implementation of the cash social assistance policy is carried out in 3 aspects, namely (1) the implementing organization of the cash social assistance distribution policy involves the post office as a distributor, the local government supervises the distribution process and funds are sourced from the central government. The human resources involve the Social Service, the Indonesian National Police, the prosecutor's office and the Post Office. (2) Policy interpretation shows that there is a common understanding between implementers and recipients of their respective roles. (3) The implementation of cash social assistance is carried out by involving various stakeholders by providing a schedule for aid recipients, but suddenly and the recipients of assistance are still using 2015 data.

Keywords: policy, implementation & social assistance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Salah satu tantangan Indonesia adalah adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bermula di awal tahun 2020. Pandemi ini penyebarannya sangat cepat yang

mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19 (Ristyawati, 2020). Upaya pemerintah dalam rangka mencegah dampak Covid -19 melalui bantuan sosial tunai dilakukan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan.

Akibat kasus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing* (*pembatasan Sosial*), mengeluarkan himbauan untuk *Work From Home* bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Kebijakan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus penyebaran COVID-19. Kebijakan ini tentunya memiliki banyak dampak dari berbagai sektor pada masyarakat pesisir, karena lokasi penerapan PSBB. adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, melainkan juga pada keadaan sosial dan ekonomi. Untuk itu bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja lepas yang mengalami kemerosotan ekstrim bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerjanya, serta penurunan tentang daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Fatkhul Khoiriyah dkk, (2020:98).

Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Buton tahun 2020, tentu tidak terlepas dari Peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton. Pengorganisasian (Organizing), merupakan salah satu kegiatan dalam suatu organisasi yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan kebijakan sesuai yang diharapkan. Dimana setelah kebijakan ditetapkan, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti melihat bahwa implementasi kebijakan pemerintah terkait pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 dalam rangka upaya penanggulangan pandemi Covid-19, belum tertata baik yang dapat di lihat pada organisasi berkerja dengan metode dan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu sumber daya manusia implementor kebijakan yang masih terbatas, sehingga proses penyaluran bantuan kadang terhambat, walaupun masalah tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan.

Untuk dapat memberikan solusi atas kebijakan proses pembuatan kebijakan harus komprehensif dan juga melalui implementasi kebijakan. Melalui implementasi kebijakan, maka akan diketahui berbagai persoalan kebijakan dan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, sehingga dengan demikian kebijakan akan mengalami terminasi atau revisi inkremental. Maka penelitian ini menganalisis fenomena permasalahan Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton berdasarkan dimensi: Organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan. Proses ini melibatkan penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Agar kebijakan bisa efektif, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, menjaga komunikasi yang baik, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Sedangkan keberhasilan Implementasi kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni; (1) Organisasi yaitu merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi. (2). Interpretasi yaitu aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. (3) Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program, (Jones. 1994).

Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Edi Suharto menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Edi Suharto. (2009: 48). Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan, Edi Suharto. (2009: 42).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6). Sumber data dalam penelitian menurut Lofland dalam Moleong (2010:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data wawancara yang merupakan informasi responden tentang implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai pada masa pandemi di Kabupaten Buton 2020. Data terkumpul dipisahkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data kualitatif, antara lain pengamatan (observasi), wawancara (Interview), dan dokumentasi.

Data setelah dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah analisis data yaitu kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan sehingga memperoleh temuan-temuan yang didapat selama penelitian. Terdapat beberapa tahapan aktivitas dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, *Data* (Reduksi Data) analisis data dan Kesimpulan atau verifikasi.

untuk memisahkan data te;ah faid maka dilakukan Validitas keabsahan data. Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sugiyono (2011:181-183) menyebutkan bahwa dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji Uji Kredibilitas, Uji Transferability, Uji Dependability, dan Uji Konfirmability, atau disebut juga uji objektivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan dan pengoperasian suatu kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, antara lain pengorganisasian, intrepretasi dan aplikasi. Implementasi kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan pada berbagai sumber diatas maka penelitian ini dapat diketahui bahwa organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia menggunakan pegawai yang sudah ada di dinas sosial dan kantor pos. Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:

Sumber Daya Sumber daya

Proses implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia

dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya untuk pendukung kebijakan bantuan Sosial Tunai, bersumber pada sumber daya manusia yang ada, tidak ada rekrutmen pegawai. Pemerintah masih memberika kepercayaan pada dinas social dan kantor pos untuk melakukan penyaluran BST. Kantor pos hanya menyalurkan bantuan social di desa, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan BST profesional, sehingga mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

mereka mempunyai kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan sesuai dengan kemampuan mereka, disamping itu mereka juga mampu mendorong masyarakat. berangkat dari kondisi tersebut, pihak pelaksana penyalur BST oleh kantor Pos cukup ramai sehingga beresiko bagi yang kurang sehat. Oleh itu kantor perlu segera mungkin melakukan pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga yang kompeten dalam pelaksanaan BST. Berkaitan dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan BST.

Selanjutnya sebagaimana pernyataan yang diperoleh dari seluruh informan dimana sebagian dana yang digunakan untuk masyarakat miskin berasal dari dana pemerintah pusat dan di salurkan oleh PT pos. Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana relative baik, artinya secara pendidikan mereka cukup baik. sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Unit-Unit / Struktur Organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa: "dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi". Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa struktur organisasi pelaksana BST di Kabupaten Buton telah terbentuk dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota yang ada. struktur sudah terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas, dari jumlah tidak masalah namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota disatu sisi dapat dikatakan sudah sangat baik walaupun sebetulnya bukan tugas wajib mereka misalnya TNI, Polri dan Kejaksaan. Selain itu pelaksanaan tugas terkendala waktu yang mereka sediakan untuk membantu pelaksanaan tugas ini terbatas karena mereka memiliki pekerjaan lain untuk dilakukan dan juga terdapat anggota tidak total melaksanakan pekerjaan ini karena memiliki profesi lain.

Metode

Menurut Agus M. Hardjana. (2003) Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah, metode tidak kalah penting perannya didalam pencapaian tujuan. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan pelaksanaan program BST yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Pusat dalam rangka pencegahan kemiskinan dampak dari pandemic covid-19.

Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya sesuatu kebijakan

dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Grindle (1980) bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, hal itu menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: *What is the precondition for successful policy implementation? Dan What are the primary obstacles to successful policy implementation?* Pertanyaan mendasar diletakkan pada apa yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Jones (1994:12) mengartikan implementasi kebijakan sebagai “getting the job done and doing it”. Pengertian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi tidak berarti bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional. Implementasi kebijakan publik menekankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu, kelompok atau pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholdernya.

Intrepretasi

Mengacu pada berbagai sumber diatas dapatlah diketahui bahwa intrepretasi kebijakan adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. Penyaluran bantuan sosial tunai oleh pemerintah dengan yang melibatkan Kantor Pos sebagai penyalur berjalan sebagaimana arahan kebijakan. Pemerintah daerah hanya sebatas memantau, memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan serta menerima dan menampung aduan masyarakat terkait dengan bantuan lalu kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Keberhasilan Pelaksanaan BST yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara berbagai stakeholder dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan. Karena itu, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan bahwa mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan BST di Kabupaten Buton sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi pelaksana.

Penerapan

Mengacu pada berbagai temuan diatas dapat diketahui bahwa penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan penerima bantuan masih menggunakan data 2015, sehingga ada warga yang sebetulnya tidak berhak mendapat bantuan sosial tetapi mendapat bantuan sosial.

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksanaannya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya

merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones (1994:320) mengatakan application, adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial tunai diterapkan di Kabupaten Buton dengan memperhatikan 3 aspek penting dalam keberhasilan kebijakan yaitu: (1) Organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia melibatkan Dinas Sosial, TNI Polri, kejaksaan dan Kantor Pos. (2) Interpretasi kebijakan adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. Penyaluran bantuan sosial tunai oleh pemerintah dengan yang melibatkan Kantor Pos sebagai penyalur berjalan sebagaimana arahan kebijakan. Pemerintah daerah hanya sebatas memantau, memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan serta menerima dan menampung aduan masyarakat terkait dengan bantuan lalu kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. (3) Penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan penerima bantuan masih menggunakan data 2015, sehingga ada warga yang sebetulnya tidak berhak mendapat bantuan sosial tetapi mendapat bantuan sosial.

Oleh karena itu disarankan agar pemerintah perlu melakukan evaluasi data kemiskinan secara terpadu dan berkala, guna memastikan masyarakat penerima dan yang tidak berhak menerima bantuan sosial. selain itu hendaknya masyarakat menyadari bahwa bantuan sosial tidak menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan akan menimbulkan ketergantungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi), Alfa Beta. Bandung.
- Cambara, C., & Izzatusholekha. (2021). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Gandaria Utara RW 02. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UNJ*, 1–6. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnas>
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edi Suharto. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia., (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.
- Grindle, M. S. 198,. *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the Third worldr*, Pricenton University Press. New Jersey.
- Jones, C. O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: Manajemen PR Raja Grafindo Persada.
- Kartodihardjo, H. (2017). *Analisis Kebijakan Pengelolaan sumber Daya Alam; diskursus-politki-Aktor-Jaringa*. (pertama). sajogyo Institute, yayasa Auriga, RMI, P4W-IPB, PSA-IPB & Firdaus Pressindo.
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Disease Virus 2019 (COVID-19)
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>
- Moleong, Lexy J. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 25, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyadi, D. 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>

- Rian Nugroho, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*.
- Santoso, P. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Research Center for Politisc and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Setiani, M. F. D. A., & Yulianto, B. A. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Sosiologi1 Masaji. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 1-5.
- Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia,(Bandung: Fokus Media 2012), 2-3
- Subarsono. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- Solichin, Abdul Wahab, 2017, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balairung, Yogyakarta.
- Yusran Lapananda, S.H., M.H, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,(Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013),1-4
- Widodo, Joko. 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media. Malang
- Winarno, B. 2007, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Med Press IKAPI. Yogyakarta.